

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Indonesia. Salah satu karakteristik pajak adalah bersifat memaksa agar masyarakat patuh untuk membayar pajaknya. Bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menagih pajak terutang. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk memahami pelaksanaan tindakan penagihan pajak pusat, khususnya penyitaan rekening penanggung pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. Setelah surat paksa, penyitaan rekening merupakan tindakan penagihan yang paling sering dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kantor Pelayanan Pajak melakukan tindakan penyitaan rekening terhadap penanggung pajak dan mencari kendala serta solusi terkait pelaksanaan tindakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara terhadap tiga orang narasumber dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Jakarta Palmerah. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan penagihan di KPP Pratama Jakarta Palmerah dibanding dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan secara garis besar sudah sesuai dengan PMK/189/2020 atau peraturan yang berlaku dengan beberapa kendala seperti SOP dari pihak bank yang tidak konsisten yang dapat diatasi dengan komunikasi dan penyuluhan kepada kantor pusat dan cabang bank.

Kata kunci: *Penagihan pajak, Penyitaan Rekening, Penanggung Pajak, Jurusita Pajak, KPP Pratama Jakarta Palmerah*

Abstract

Taxes are the main source of revenue for Indonesia. One characteristic of taxes is that they are compulsory in order to ensure that the public complies with paying their taxes. The government enforces tax collection through the process of collecting outstanding taxes. This study aims to understand the implementation of tax collection actions by the central government, particularly the seizure of taxpayer accounts within the Tax Service Office. After the issuance of a demand letter, the seizure of accounts is the most commonly employed tax collection action carried out by Tax Execution Officers against taxpayers. The objective of this research is to determine how the Tax Service Office carries out the seizure of taxpayer accounts and to identify the obstacles and potential solutions related to the implementation of such actions.

This research utilizes a qualitative method. Data collection is conducted through literature review and field research methods. The field research involves conducting interviews with three individuals from the Examination, Assessment, and Collection Section of the Jakarta Palmerah Primary Tax Office. The interviews are intended to assess the conformity of tax collection actions at the Jakarta Palmerah Primary Tax Office with the applicable regulations.

The research findings indicate that, overall, the implementation of tax collection actions aligns with PMK/189/2020 or the applicable regulations. However, there are some challenges, such

as inconsistencies in the standard operating procedures (SOP) of banks, which can be addressed through communication and education with the central and branch offices of the banks.

Keywords: Tax collection, Account seizure, Taxpayer, Tax Execution Officer, Jakarta Palmerah Primary Tax Office.